



ANALISIS FAKTOR INTEGRASI SOSIO-KULTURAL-HISTORIS PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Muhamad Arif

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: arifia555@yahoo.co.id atau muhamad.arif@uinjkt.ac.id

Naskah diterima : 15 Oktober 2016, direvisi : 17 November 2016, disetujui : 20 Desember 2016

Abstract

Post-1998 reform of the Indonesian nation was shocked by the social conflict that was previously unimaginable. The social conflict immediately arouse awareness to build a positive attitude through the effort to explore the factors of integration in a society. This article aims to explore the factors of integration in a multicultural society. For qualitative descriptive study was carried out, by doing participant observation, in-depth interviews, and documentation. The result was found three factors of integration as follows. First, the historical factors concerning the friendly relations between the Mataram kingdom and the kingdom of Buleleng, which boiled down to the relationship of brotherhood and kinship, between the Muslims and the Hindus that took place since the 17th century. Secondly, the occurrence of inter-ethnic marriages (amalgamation) among the Javanese and Balinese thus eliminating the psychological distance and distance sociological, reinforced with Menyama Braya conception and Ukhuwah Basyariah conception. Third, assimilation and acculturation between Islamic culture and the culture of Bali that still survive today.

Keywords: *multicultural society; amalgamation; social integration; assimilation; acculturation*

Abstrak

Pasca reformasi 1998 bangsa Indonesia dikejutkan oleh konflik sosial yang tak terbayangkan sebelumnya. Konflik sosial tersebut segera menggugah kesadaran untuk membangun sikap positif melalui upaya menggali factor-faktor integrasi dalam suatu masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor integrasi dalam masyarakat Pegayaman yang multikultural. Untuk itu dilakukan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasilnya adalah ditemukan adanya tiga faktor integrasi sebagai berikut. *Pertama*, faktor historis menyangkut hubungan persahabatan antara kerajaan Mataram dan kerajaan Buleleng, yang mengerucut pada hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, antara orang-orang Islam dan orang-orang Hindu yang berlangsung sejak abad ke-17. *Kedua*, terjadinya perkawinan antaretnik (*amalgamasi*) antara orang-orang Jawa dengan orang-orang Bali sehingga menghilangkan jarak psikologis dan jarak sosiologis, yang diperkuat dengan konsepsi *menyama braya* dan konsepsi *ukhuwah basyariah*. *Ketiga*, terjadinya asimilasi dan akulturasi antara budaya Islam dan budaya Bali yang masih bertahan hingga saat ini.

Kata kunci: masyarakat multikultural; amalgamasi; integrasi sosial; asimilasi; akulturasi

Pengutipan: Arif, M. (2016). Analisis Faktor Integrasi Sosio-Kultural-Historis pada Masyarakat Multikultural. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3(2), 2016, 126-134. doi:10.15408/sd.v3i2.4374.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v3i2.4372>

A. Pendahuluan

Pasca reformasi 1998 bangsa Indonesia dikejutkan oleh konflik sosial yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebut saja beberapa konflik sosial yang pernah menghantui masyarakat di Aceh, Ambon, Sambas, Sampit, Poso, Maluku, dan Papua. Kejutan-kejutan yang disebabkan oleh beberapa konflik sosial tersebut seolah menggugah kesadaran bahwa di balik kesantunan dan kedamaian yang sering ditampilkan oleh bangsa Indonesia yang multikultural itu ternyata tersimpan potensi konflik sosial yang rentan dimainkan oleh aktor-aktor politik busuk yang sengaja menggunakan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan demi kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, fenomena konflik sosial merupakan sesuatu yang lazim terjadi, mengingat dalam kehidupan sosial tidak mungkin tidak terjadi perbedaan paham, perbedaan kepentingan, lalu meningkat menjadi konflik kepentingan, dan bahkan konflik sosial yang lebih luas. Yang terpenting adalah membangun kesadaran untuk merespon konflik sosial dengan sebaik-baiknya. Sebab, dalam wacana sosiologis, konflik sosial jika dibiarkan berkepanjangan akan berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem sosial yang ada. Respon yang baik terhadap konflik sosial justru membantu dalam mewujudkan integrasi sosial. Dalam hal ini Lewis A. Coser menjelaskan bahwa tidak selama konflik sosial bersifat negative, melainkan dalam hal tertentu dapat bersifat positif, yakni membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan pentingnya hidup bermasyarakat.¹

Penulisan artikel didorong oleh *concern* penulis untuk menggali faktor-faktor integrasi sosial yang dalam perspektif sosial, kultural, dan religius, sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang secara alamiah dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural. Penting kiranya untuk memunculkan kembali konsepsi multikulturalisme yang bukan sekedar pengakuan terhadap adanya perbedaan, melainkan ditingkatkan pada level penempatan perbedaan secara simetris (*symmetrical differentiated citizenship*), yakni dengan mengakui adanya

pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan terhadap pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan/atau isu-isu sektarian yang bisa mengancam harmoni dalam kehidupan bersama.²

Sebagaimana yang dikutip dari Fay, Jary dan Jary, Watson, dan Reed, Parsudi Suparlan menguraikan bahwa multikulturalisme merupakan acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural.³ Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mozaik. Mozaik kebudayaan tersebut mencakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil untuk kemudian mewujudkan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Dengan demikian, konsep multikulturalisme pada dasarnya menekankan pada kesediaan untuk menerima kelompok lain sebagai bagian dari satu-kesatuan, tanpa menyisakan sikap apriori terhadap berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun agama. Bahwa segala perbedaan yang ada memiliki kedudukan yang sama di dalam ruang publik. Penekanan multikulturalisme bukan pada perbedaannya, melainkan pada perlakuan yang sama terhadap perbedaan yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah relasi keberbedaan yang di dalamnya terdapat pengakuan dan penghargaan eksistensial terhadap tiap-tiap perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun agama, dalam sebuah kesetaraan.

Sejalan dengan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mencermati masyarakat Pegayaman yang multikultural. Masyarakat

2 Syamsuddin Haris. 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI).

3 Parsudi Suparlan. 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia ke-3*, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

1 Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press, 1956, p. 115.

yang terbentuk dari berbagai macam suku – terutama Jawa, Bali, dan Bugis—dan agama –terutama Islam dan Hindu, akan tetapi tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang dapat hidup berdampingan secara damai. Penulis sangat tertarik untuk menggali faktor-faktor integrasi dalam masyarakat Pegayaman yang multikultural. Menurut hemat penulis, masyarakat Pegayaman bisa direkomendasi sebagai salah satu *banch mark* dalam hal integrasi sosial, integrasi kultural, dan integrasi religius.

B. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam arti penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi.⁴ Penelitian dilaksanakan pada masyarakat Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, mengingat kondisi masyarakatnya yang bersifat multikultural, yakni terdiri dari unsur-unsur etnik Jawa, Bali, Bugis, dan sebagainya, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, di samping beberapa di antaranya yang memeluk agama Hindu dan Kristen.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami berbagai data dan konsep yang ditemukan selama proses penelitian.⁵ Untuk mendukung maksud tersebut, peneliti melakukan pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif argumentatif. Seperti yang dijelaskan oleh Sukmadinata, bahwa penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran tentang suatu kondisi secara apa adanya. Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tidak diberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel.⁶

Proses analisis mengacu pada konsepsi Spradley, yakni menggunakan strategi maju

bertahap. Menurut strategi ini proses analisis berlangsung tahap demi tahap, bersamaan dengan proses pengumpulan data. Agar memudahkan proses, penelitian ini akan mengikuti analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Mereka menyebutnya sebagai model alir (*flow model*) sebagaimana tertera dalam gambar di bawah. Alur ini menunjukkan secara kronologis kegiatan analisis data dilakukan selama, dan pasca pengumpulan data. Selain itu juga dilakukan analisis antisipatif berupa penajakan studi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Historis dalam Integrasi Sosial pada Masyarakat Pegayaman

Keberadaan etnik Jawa, Bali, Bugis, dan beberapa etnik lainnya di dalam masyarakat Pegayaman merupakan realitas sosiologis yang tak terpisahkan dari realitas historis. Realitas sosiologis yang dimaksud adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat Pegayaman yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik tersebut. Sementara realitas historis merupakan fakta empiris menyangkut kapan, mengapa, dan bagaimana orang-orang Jawa dan orang-orang Bugis, dan sebagainya datang di Buleleng pada umumnya dan Pegayaman pada khususnya.

Berbagai penjelasan menguatkan bahwa kedatangan orang-orang Jawa, tak terkecuali apakah dari Blambangan, Probolinggo, maupun Solo, sebagaimana yang banyak ditemukan dalam berbagai riwayat, terkait erat dengan sejarah terjalannya hubungan bilateral antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Buleleng. Penulis berpandangan bahwa hubungan bilateral antara kedua kerajaan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan yang sama, yakni keinginan untuk membendung pengaruh VOC yang sejak tahun 1662 ingin memaksanakan sistem monopoli dagang di Nusantara. Kekhawatiran akan pengaruh VOC tersebut semakin menguat setelah mengetahui adanya hak *octroi* yang dimiliki oleh VOC, antara lain berisi: (a) hak untuk mencetak uang, (b) hak untuk melaksanakan sistem monopoli dagang, (c) hak untuk menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain, (d) hak untuk membentuk pasukan perang, (e) hak untuk menyatakan perang, dan bahkan (f) hak

4 Lihat: N. Sudjana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. h. 64.

5 Denzini, Norman K dan Yvonna S, Lincoln. ed. 1996. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication. h. 207.

6 Lihat: N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. h. 73.

untuk menguasai negara lain.

Untuk membendung intervensi VOC Belanda yang dikenal licik akan sulit jika hanya dilakukan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya, kerajaan Mataram dan kerajaan Buleleng menjalin hubungan persahabatan. Dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan tersebut, kerajaan Mataram mengirimkan hadiah berupa seekor gajah perang berikut para pengiring yang diyakini terdiri dari para prajurit terpilih sekaligus berkemampuan untuk menjadi pawang gajah. Berdasarkan cerita turun-temurun, sampai saat ini masyarakat Pegayaman masih meyakini akan keberadaannya sebagai keturunan dari para prajurit Mataram. Tidak hanya sampai di situ, desain tata kelola permukiman dengan ruas-ruas jalan yang saling bertemu, dilengkapi dengan gang-gang pembatas antarrumah yang dibuat sedemikian rupa sehingga masih memungkinkan bagi kendaraan kuda untuk melakukan mobilitas perang, semakin memperkuat keyakinan bahwa para pendiri Desa Pegayaman merupakan para prajurit pilihan dari kerajaan Mataram.⁷

Hubungan persahabatan antara kerajaan Mataram dan kerajaan Buleleng tersebut memberikan pengaruh bagi eratnya relasi antara kalangan Puri Buleleng dengan para prajurit Mataram. Hubungan antara keduanya terjalin layaknya hubungan antara dua saudara. Hubungan persahabatan yang lambat laun berubah menjadi hubungan persaudaraan tersebut semakin kuat karena di Bali sendiri terdapat konsepsi *menyama braya*, yakni pandangan bahwa orang lain adalah saudara atau bahkan keluarga sendiri. Orang-orang Bali menyebut orang-orang Jawa yang semuanya beragama Islam dengan *Nyama Selam*, yang bermakna *Saudaraku yang beragama Islam*. Sementara orang-orang Islam menyebut orang-orang Bali dengan *Nyama Bali*, yang bermakna *Saudaraku yang beragama Hindu*. Sementara orang-orang Islam juga memiliki konsep *ukhawah basyariah*, yakni menjalin persaudaraan antara sesama manusia, dengan spirit *rahmatan lil' alamin*, bahwa kehadiran umat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Atas hubungan yang erat tersebut, orang-orang Islam dipersilahkan untuk membuka permukiman, seluas yang diinginkan, di kawasan hutan Gayam, yang sekarang dikenal sebagai Desa Pegayaman. Sebaliknya, orang-

⁷ Diolah berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketut Muhammad Suharto pada tanggal 6 Agustus 2016.

orang Jawa, yang tak lain merupakan para prajurit Mataram, yang kemudian diperkuat oleh kedatangan eks prajurit Bugis-Makassar yang pergi dari kerajaan Makasar setelah kekalahan kerajaan Makassar yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bongaya pada tahun 1669, karena merespon positif kebaikan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, akhirnya membangun komitmen untuk membentengi kerajaan Buleleng dari ancaman musuh dari selatan, yakni dari kerajaan Mengwi dan sekitarnya.⁸

Poin yang ingin penulis tekankan adalah bahwa hubungan persahabatan antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Buleleng telah memberikan landasan historis yang kuat bagi terjalinnya rasa persaudaraan antara orang-orang Bali dengan orang-orang Islam hingga saat ini, sehingga menjadi salah satu faktor bagi integrasi sosio-kultural-religius pada masyarakat Pegayaman yang multikultural.

2. Faktor Sosiologis dalam Integrasi Sosial pada Masyarakat Pegayaman

Kebijakan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang mempersilahkan orang-orang Islam untuk menikahi puteri dari kalangan Puri Buleleng menjadi faktor fundamental yang mengilangkan jarak psikologis dan jarak sosiologis antara orang-orang Islam dengan orang-orang Bali. Dalam konteks ini, menjadi menarik untuk menganalisis efek dari kebijakan perkawinan antaretnis, atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, sebagai faktor sosiologis bagi integrasi sosio-kultural-religius pada masyarakat Pegayaman.

Amalgamasi adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda latar belakang suku dan kebudayaannya. Dengan kata lain, amalgamasi adalah pembauran biologis antara dua orang yang masing memiliki ciri-ciri fisik dan sekaligus budaya yang berbeda.⁹ Amalgamasi antara etnis Jawa dengan etnis Bali menjadi faktor bagi terjadinya integrasi sosio-kultural-religius pada

⁸ Diolah berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketut Ali Hanafiah pada tanggal 5 Agustus 2016 dan wawancara dengan Ketut Muhammad Suharto pada tanggal 6 Agustus 2016.

⁹ Lihat: Kardian dan Syamsul Bahri, *Setengah Abad Amalgamasi antara Etnis Jawa dengan Etnis Tempatan di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Jurnal FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015.

masyarakat Pegayaman, mengingat penjelasan Banton bahwa integrasi sosial merupakan suatu pola hubungan dalam suatu masyarakat yang tidak menafikan terhadap keberadaan beberapa etnis, akan tetapi tidak membesar-besarkan perbedaan antaretnis yang ada. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang terkait dengan etnis seseorang tetap dihargai secara proporsional, tetapi tidak berpengaruh sama sekali terhadap pekerjaan, status yang diraih melalui usaha tertentu, berikut hak dan kewajiban sosial lainnya yang berlaku secara umum.¹⁰

Dua orang yang berasal dari latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda, yang kemudian bersatu dalam sebuah lembaga keluarga, tentu bukan sesuatu yang sederhana. Kedua belah pihak akan melalui sebuah interaksi yang panjang. Dalam hubungan ini, Dugan Romano menjelaskan adanya empat tipe perkawinan antaretnis. *Pertama*, tipe patuh, yakni salah satu pihak bersedia menerima pihak pasangan secara sepenuhnya. *Kedua*, tipe kompromi, yakni kedua belah pihak saling berkompromi dengan saling mengorbankan hal-hal yang bersifat prinsip demi komitmen terhadap pasangannya. *Ketiga*, tipe eliminasi, yakni masing-masing pasangan tidak bersedia untuk saling berkompromi satu sama lain sehingga cenderung menimbulkan kemiskinan budaya. *Keempat*, tipe konsensus, yakni kedua belah pihak saling setuju dan saling sepakat terhadap budaya masing-masing, apapun bentuknya.¹¹ Berdasarkan keempat tipe tersebut, masyarakat Pegayaman memperlihatkan kecenderungan pada tipe kedua dan keempat, yakni tipe kompromi dan tipe konsensus sehingga pada akhirnya terjadi proses adaptasi.

Young Yun Kum, sebagaimana yang dikutip oleh Rullyani Purpowardhani,¹² menjelaskan bahwa proses adaptasi budaya meliputi dua dimensi yang saling berkaitan. *Pertama*, komunikasi yang bersifat personal

mengangkut masalah-masalah kognitif, afektif, dan operasional. *Kedua*, komunikasi sosial yang merupakan wujud dari partisipasi individu dalam aktivitas komunikasi interpersonal terkait dengan massa budaya tertentu. Dengan demikian, dalam perkawinan antaretnik, perbedaan budaya yang ada perlu disikapi secara aktif oleh kedua belah pihak. Melalui sikap aktif seperti ini diharapkan berkembang komitmen bersama untuk kesepakatan untuk saling mendukung, baik dalam komunikasi yang bersifat personal maupun dalam komunikasi yang bersifat sosial. Dengan demikian akan terlihat benang merah bahwa jika dalam perkawinan antaretnik disikapi secara aktif oleh kedua belah pihak, maka akan terjadi proses adaptasi budaya. Proses adaptasi budaya tersebut pada gilirannya akan menjadi prasarat bagi proses asimilasi dan akulturasi.

Amalgamasi antara orang-orang Jawa yang beragama Islam dengan puteri-puteri Bali yang beragama Hindu –meskipun kemudian dikonversi menjadi Islam, telah memberikan kemungkinan bagi terjadinya asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang timbul bila terdapat beberapa orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, untuk kemudian saling bergaul secara langsung dan intensif dalam jangka waktu yang lama sehingga unsur-unsur kebudayaan di antara kedua golongan mengalami perubahan wujud menjadi unsur-unsur budaya campuran.¹³ Dalam kasus amalgamasi pada masyarakat Pegayaman, hasil asimilasi dapat diamati pada konteks sosiologis dalam kehidupan sehari-hari dalam beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, dalam hal bahasa, masyarakat Islam Pegayaman sepenuhnya menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Dalam kehidupan sehari-hari nyaris tak terlihat istilah-istilah yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Bugis. Realitas seperti ini, selain karena masyarakat di lingkungan sekitar Desa Pegayaman yang secara keseluruhan berbahasa Bali, juga karena para istri dan/atau para ibu yang memang berasal dari etnik Bali yang menggunakan bahasa Bali sejak awal komunikasi dengan generasi-generasi setelahnya.

10 Lihat: Kamanto Soenarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004, h. 150.

11 Lihat: Dugan Romano, *Intercultural Marriage, Promises and Pitfalls*. Maine: Intercultural Press, Inc., 1988.

12 Lihat: Rullyanti Purpowardhani, *Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta*, sebuah tesis untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Komunikasi Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2008.

13 Lihat: Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 225.

Kedua, dalam hal pakaian, masyarakat Pegayaman mengenakan pakaian layaknya masyarakat Bali ketika sedang melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi saat waktu shalat tiba, atau ketika merayakan hari-hari besar keagamaan, mereka mengenakan pakaian sebagaimana lazimnya para santri di Jawa berpakaian, yakni mengenakan songkok, baju koko, dan sarung khas Nusantara. Sementara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat adat, masyarakat Pegayaman mengenakan *udeng* (ikat kepala) dan *lancingan* (kain) sebagaimana yang dikenakan oleh masyarakat Bali pada umumnya.

Ketiga, dalam hal organisasi sosial, masyarakat Pegayaman menggunakan istilah *sekaha* (yang berarti kelompok) dan *banjar* (yang berarti dusun) yang diambil dari istilah Bali. Misalnya *sekaha* Yasinan, *sekaha* Burdah, *sekaha* Hadrah, *sekaha* Dibaiyah, *Banjar Dangin Rurung*, *Banjar Daub Rurung*, dan sebagainya. Bahkan, untuk mendukung kegiatan pertanian, masyarakat Islam Pegayaman juga memiliki *Sekaha* Subak sebagaimana sistem Subak yang berkembang pada masyarakat Bali.

Keempat, dalam hal kesenian, masyarakat Pegayaman mengkombinasikan secara proporsional antara budaya Islam dengan unsur budaya Bali. Kombinasi antara dua unsur budaya tersebut terlihat, misalnya, pada *Seni Burdah* dan *Seni Hadrah* yang masih cukup terpelihara dengan baik pada masyarakat Islam Pegayaman, terbukti dengan adanya 2 (dua) *Sekaa Burdah* dan 4 (empat) *Sekaa Hadrah*. Seni Burdah dan Seni Hadrah pada dasarnya merupakan pembacaan syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Kitab Al-Barzanji. Pembacaan syair-syair tersebut dilagukan dengan nada yang mirip dengan nada *mekidung* dalam masyarakat Bali pada umumnya, diiringi dengan tabuhan rebana yang kompak dan rampak, dan bahkan pada saat-saat tertentu ditampilkan juga atraksi pencak silat. Satu hal yang menjadi ciri khas Seni Burdah dan dan Seni Hadrah adalah *udeng*, yakni ikat kepala khas Bali, dan *lancingan*, yakni kain khas Bali, yang dikenakan oleh para pemain kesenian tersebut.

Kelima, dalam hal peralatan dan teknologi penunjang kehidupan sehari-hari, masyarakat Pegayaman juga mengadopsi sistem peralatan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat

Bali pada umumnya. Hal ini, misalnya, terlihat dalam penggunaan *lesung*, *alu*, *saab*, *tenggala*, *dulang*, *penareke*, dan sebagainya. Demikian juga dengan sistem mata pencaharian masyarakat Pegayaman yang tak ubahnya sistem mata pencaharian masyarakat Bali, yakni menyesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi kealaman di lingkungan setempat. Dalam hal ini, masyarakat Pegayaman mengolah lahan untuk membudidayakan pertanian dan perkebunan, yakni dengan menanam padi, cengkih, kopi, dan beberapa tanaman keras lainnya. Tak ubahnya masyarakat Bali yang ada di lingkungan sekitar Desa Pegayaman.

Keenam, dalam hal penamaan anak, mengingat pada dasarnya masyarakat Pagayaman merupakan keturunan antara lelaki Jawa dan wanita Bali, maka pemanggilan nama anak sangat dipengaruhi oleh tradisi kaum ibu Bali yang menyebut *Wayan* untuk anak pertama, *Nengah* untuk anak kedua, *Nyoman* untuk anak ketiga, dan *Ketut* untuk anak keempat. Tidak heran jika kemudian dijumpai nama Wayan Abdul Ghafar Ismail, Wayan Imam Muhajir, Nengah Abdul Jabbar, Nengah Ali Murtadho, Nyoman Soleh Hasan, Nyoman Firman Arifin, Ketut Ali Hanafiah, Ketut Suhwardi Abbas, dan sebagainya.

Ketujuh, adalah menyangkut perkawinan antaretnik yang sejak awal terjadi pada masyarakat Pegayaman. Dalam hal ini Hariyono menjelaskan bahwa perkawinan antaretnik merupakan puncak dari bentuk asimilasi, yang diistilahkan sebagai asimilasi perkawinan. Asimilasi perkawinan memberi pengertian tentang bersatunya jiwa, kepribadian, sifat, dan perilaku antara dua figur (yang berlainan jenis kelamin) yang memiliki perbedaan latar belakang etnik dan budaya. Kedua belah pihak akan saling menerima perbedaan, dan sekaligus saling memberi pengertian, untuk selanjutnya berjalan secara bersama-sama dengan saling mengakomodasi satu sama lain dalam sebuah lembaga keluarga.¹⁴

Dalam hal asimilasi pada masyarakat Pegayaman tersebut, tampaknya budaya Bali berperan secara dominan dalam kehidupan

¹⁴Lihat: P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, h. 17.

masyarakat Pegayaman. Akan tetapi menyangkut agama dan kepercayaan, masyarakat Pegayaman sangat disiplin dalam berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Mengingat wujud asimilasi kebudayaan yang terintegrasi secara menyeluruh pada masyarakat Pegayaman, maka kuat dugaan bahwa amalgamasi terjadi secara massif sejak masa-masa awal proses pembangunan permukiman Pegayaman oleh para pemula.

3. Faktor Kultural dalam Integrasi Sosial pada Masyarakat Pegayaman

Amalgamasi antara orang-orang Jawa dengan puteri-puteri Bali, selain telah memberikan kemungkinan bagi terjadinya proses asimilasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga telah memberikan kemungkinan bagi terjadinya proses akulturasi. Secara teori, akulturasi terjadi jika suatu kelompok etnis dengan latar belakang kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan baru sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan yang baru tersebut lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.¹⁵ Akulturasi tersebut menjadi semakin komprehensif ketika secara implementatif masyarakat Pegayaman berhasil menyeleksi sistem adat dan tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bali dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam dengan *motto Adat Berpangku Syara*.

Motto masyarakat Pegayaman tersebut tentu tidak berlebihan. Pada setiap blok hampir dipastikan terdapat mushalla sehingga sarana ibadah tampak bertebaran di berbagai tempat. Selain satu masjid agung yang berada di pusat Desa Pegayaman, secara keseluruhan juga terdapat tiga puluh sembilan mushalla. Seluruh sarana ibadah tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk melaksanakan ibadah, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ibadah harian dapat dilihat pada semaraknya seluruh masjid dan mushalla ketika waktu shalat tiba, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Taman Pendidikan Al-

Qur'an (TPA), serta kajian-kajian keagamaan lainnya, baik di masjid maupun di rumah. Ibadah mingguan dapat diperhatikan misalnya pada saat penyelenggaraan shalat Jum'at yang dipusatkan di Masjid Jami' Safinatussalam, setelah pada malam sebelumnya digelar kegiatan *yasinan*, *manakiban*, *dzikir*, *diba'an*, serta ceramah keagamaan di rumah-rumah tokoh-tokoh masyarakat setempat. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa kehidupan keagamaan dan kebudayaan pada masyarakat Islam Pegayaman sangat dominan dengan simbol-simbol budaya Bali. Meminjam konsep Koentjaraningrat¹⁶ tentang unsur-unsur budaya universal, simbol-simbol budaya Bali yang melekat pada masyarakat Islam Pegayaman akan tampak terutama dalam enam unsur, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Sementara dalam hal sistem religi, masyarakat Islam Pegayaman justru masih berpegang tegus dengan ajaran agama Islam.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat Islam Pegayaman berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Dalam hal pokok-pokok agama (*ushuluddin*) mereka cukup konsisten, akan tetapi dalam menjalin kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), mereka mengadopsi budaya-budaya Bali. Hal ini terlihat dalam sistem *ngunya* pada pernikahan, *ngejot* pada perayaan Idul Fitri, dan sebagainya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa budaya masyarakat Pegayaman dapat dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran budaya (*cultural exchange*), sebagaimana yang dikutip oleh Arsana, bahwa pertemuan budaya sering menimbulkan tiga segmen ruang, yakni segmen absolutisme budaya, segmen percampuran atau persilangan budaya, dan segmen pertukaran budaya namun tidak melebur pada level esensial.¹⁷

Segmen absolutisme budaya, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Pegayaman

16 Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 204, menguraikan tujuh unsur budaya universal, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, kesenian, dan sistem religi.

17 Lihat: I Gusti Ketut Gde Arsana, 2006, *Segresi Sosial dan Pola Adaptasi Budaya dalam Kehidupan Pluralisme Agama di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Udayana, h. 41-42.

15 Lihat: Kamanto Soenarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004, h. 248.

berpegang teguh untuk menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Dalam hal ini, ajaran agama Islam dipandang sebagai kebenaran mutlak (absolut) sehingga tidak dicampuradukkan dengan ajaran-ajaran lainnya. Sementara dalam kaitannya dengan unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan kesenian merupakan segmen percampuran budaya. Dalam konteks seperti inilah para tokoh adat Pegayaman mencanangkan motto *Adat Berpangku Syara*. Artinya, perpaduan budaya dilakukan jika tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama Islam. Itulah sebabnya, terdapat pula segmen percampuran budaya yang tidak melebur hingga pada level yang esensial. Fenomena yang terakhir ini terlihat pada tradisi *ngejot*, hal mana masyarakat Pegayaman tidak mengirim dan/atau menerima kiriman berupa darah, daging babi, dan sebagainya. Mengingat adanya sikap untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sehingga antara masyarakat Islam dan masyarakat Hindu timbul sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi.

D. Penutup

Artikel ini akan diakhiri dengan tiga kesimpulan menyangkut factor-faktor integrasi sosial pada masyarakat Pegayaman Bali, yakni sebagai berikut:

1. Secara historis, integrasi sosial pada masyarakat Pegayaman tidak terlepas dari peristiwa historis, yakni adanya hubungan kerjasama antara kerajaan Mataram dan kerajaan Buleleng. Bahwa hubungan persahabatan antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Buleleng telah memberikan landasan historis yang kuat bagi terjalannya rasa persaudaraan antara orang-orang Bali dengan orang-orang Islam hingga saat ini, sehingga menjadi salah satu faktor bagi integrasi sosio-kultural-religius pada masyarakat Pegayaman yang multikultural.
2. Secara sosiologis, perkawinan antaretnik (*amalgamasi*) antara orang-orang Jawa dengan puteri-puteri dari kalangan Puri Buleleng menjadi faktor fundamental yang mengilangkan jarak psikologis dan jarak sosiologis antara orang-orang Islam dengan orang-orang Bali di Pegayaman. Interaksi antara orang-orang Islam dan orang-orang Bali menjadi semakin dekat karena adanya konsepsi *menyama braya* pada masyarakat Bali dan konsepsi *ukhawah basyariah* pada masyarakat Islam, hal mana kedua konsepsi tersebut sama-sama menekankan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Perkawinan antaretnik tersebut telah memberikan kemungkinan bagi terciptanya interaksi sosial yang asosiasif, sehingga pada gilirannya akan memberikan kemungkinan bagi terjadinya proses asimilasi dan akulturasi budaya pada masyarakat Pegayaman. Asimilasi dan akulturasi antara budaya Islam dan budaya Bali merupakan realitas sekaligus faktor fundamental bagi integrasi sosial pada masyarakat Pegayaman.

E. Daftar Pustaka

- Coser, Lewis A. (1956). *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press.
- Denzim, Norman K dan Yvonna S, Lincoln. ed. (1996). *Handbook of Qualitatif Research*. Sage Publication.
- Haris, Syamsuddin. (2001). *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI).
- Hariyono, P. (1993). *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kardian dan Syamsul Bahri. (2015). *Setengah Abad Amalgamasi antara Etnis Jawa dengan Etnis Tempatan di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Jurnal FISIP Volume 2 No. 2 Oktober.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Parsudi Suparlan. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural,. *Makalah*, Disajikan pada Simposium *Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3*, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli.
- Purpowardhani, Rullyanti. (2008). Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta. sebuah *Tesis* untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Komunikasi Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Romano, Dugan. (1998). *Intercultural Marriage, Promises and Pitfalls*. Maine: Intercultural Press, Inc.
- Soenarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sukmadinata, Nana Saodih. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Arsana, I Gusti Ketut Gde. (2006). Segresi Sosial dan Pola Adaptasi Budaya dalam Kehidupan Pluralisme Agama di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Tesis S2*, Program Pascasarjana Universitas Udayana.